

Perkembangan Variabel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Azmi Azizah*, Ima Amaliah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*azmiazizah641@gmail.com, amaliah.daisuki@gmail.com

Abstract. Income inequality is one of the indicators used to measure a country's level of inclusive growth. High income inequality can indicate social and economic disparities that can hinder sustainable and equitable development in Indonesia. This study aims to determine the effect of LPE, Internet Access, and MSME Financing on inclusive economic growth in Indonesia. The method used in this study is panel data regression, then the data used in the research is data from 33 provinces in Indonesia for the 2016-2021 time period. Based on the results, it can be concluded that the regression results show that the Economic Growth Rate (LPE) has no effect on the Gini Ratio as an indicator of inclusive economic growth. Then, Internet Access (AI) has a negative effect on the Gini Ratio as an indicator of inclusive economic growth. Meanwhile, MSME Financing (PUMKM) has a positive effect on the Gini Ratio as an indicator of inclusive economic growth. The results of the study show that DI Yogyakarta Province is the province with the highest level of inequality. This means that inclusive growth has not been achieved. Meanwhile, the Riau Archipelago is the province with the lowest level of inequality. This shows that the economic growth in the Riau Archipelago is inclusive.

Keywords: *Inclusive Growth, Gini Ratio, Internet Access.*

Abstrak. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan inklusif suatu negara. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh LPE, Akses Internet, dan Pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel, kemudian data yang digunakan pada penelitian ialah data 33 Provinsi di Indonesia dengan periode waktu tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa LPE tidak berpengaruh terhadap Gini Ratio sebagai indikator pertumbuhan ekonomi inklusif. Kemudian, Akses Internet berpengaruh negatif terhadap Gini Ratio sebagai indikator pertumbuhan ekonomi inklusif. Sementara itu, Pembiayaan UMKM berpengaruh positif terhadap Gini Ratio sebagai indikator pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di Indonesia. Artinya, pertumbuhan inklusif belum tercapai. Sedangkan Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan paling rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau bisa dikatakan sudah inklusif.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Inklusif, Gini Ratio, Akses Internet.*

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, selama beberapa tahun terakhir kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin masih tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam beberapa kasus hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata (1). Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan akses yang inklusif terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan pelayanan dasar lainnya bagi semua orang tanpa terkecuali (2). Menurut data yang di publikasikan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), struktur perekonomian Indonesia secara spasial tidak berubah dalam 4 tahun terakhir (2014-2019) melalui distribusi PDB yang masih didominasi oleh Pulau Jawa (59,03%) dan Sumatera (21,36%). Perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), sekitar 80-81%. Sisanya, sekitar 19-20% berasal dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Gini Ratio menjadi ukuran statistik ketimpangan suatu populasi atau negara yang berkisar antara 0-1, semakin nilainya mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif, tidak hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi saja. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dianggap sebagai indikator kesuksesan perekonomian. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tanpa tindakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menyebabkan ketimpangan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (3).

Tidak hanya itu, untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian (4). Salah satu infrastruktur yang perlu diperhatikan ialah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), untuk pemanfaatan akses internet. Akses internet yang luas, terjangkau, dan merata dapat menjadi pendorong penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan adil, dimana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam perekonomian (5).

Menurut BPS, penggunaan akses internet dalam bidang ekonomi didominasi untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa terutama pada tahun 2020 mencapai 31,52% dari total keseluruhan tujuan penggunaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses internet memiliki peran dalam memfasilitasi aktivitas jual beli secara online. Dengan adanya akses internet diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai atau mengembangkan usaha. Melalui platform e-commerce, UMKM dapat menjual produk dan jasa mereka secara online, mencapai pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Hal ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya mungkin sulit mengakses pasar (6).

Upaya lainnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, diperlukan dukungan dari peningkatan akses layanan masyarakat salah satunya layanan pada sektor keuangan melalui inklusi keuangan. Dalam perspektif Islam pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan (7). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang diatur UU No. 21 Tahun 2008 tentang kegiatan penyaluran kegiatan pembiayaan oleh bank umum syariah.

Bank umum syariah melalui produk pembiayaan yang ditawarkan mampu membiayai kebutuhan baik dalam bentuk modal kerja atau investasi. Bank umum syariah banyak menawarkan jenis pembiayaan. Salah satunya ialah pembiayaan UMKM. Pembiayaan UMKM merupakan bantuan dana yang diberikan dan ditujukan khusus para pelaku UMKM. Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi pendorong UMKM dalam memulai, mengembangkan, atau menjalankan usaha (8).

Walaupun bukan isu baru, pertumbuhan ekonomi inklusif hingga saat ini semakin menarik perhatian dan dianggap penting. Isu pertumbuhan inklusif semakin menarik dengan

munculnya kelas menengah yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah inklusif. Namun pada kenyataannya, kelas menengah yang muncul di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi. Persoalan kesenjangan tentunya berlawanan dengan konsep pertumbuhan inklusif dimana pertumbuhan mampu menurunkan ketimpangan. Penelitian dalam hal ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan, seperti kesenjangan pendapatan, akses terbatas terhadap sumber daya, dan diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh secara parsial laju pertumbuhan ekonomi, akses internet, dan pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2016-2021?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh akses internet terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2016-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2016-2021.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Analisis metode dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Data panel yang digunakan pada penelitian ini ialah data cross section sebanyak 33 provinsi di Indonesia dan data time series periode waktu selama 6 tahun yaitu 2016-2021. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, dan Statistik Telekomunikasi Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Akses Internet dan Pembiayaan UMKM terhadap Gini Ratio sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berikut adalah penelitian mengenai pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, akses internet dan pembiayaan umkm terhadap gini ratio sebagai indikator pertumbuhan ekonomi inklusif, yang diuji menggunakan teknik analisis regresi. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi	Hasil Uji	Hasil
LPE	-0.000230	-1.084721	0.2794	$> \alpha = 0,05$	Tidak Signifikan
AI	-0.000516	-8.916576	0.0000	$< \alpha = 0,05$	Signifikan
PUMKM	1.69E-15	2.379591	0.0183	$< \alpha = 0,05$	Signifikan

Sumber: Hasil *output views 10*, data diolah.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil regresi data panel, nilai probabilitas variabel LPE memperoleh hasil sebesar 0.2794 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel LPE tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada Gini Ratio. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi, diakibatkan dari sumbangan sektor yang menyerap tenaga kerja sedikit. Sedangkan sektor dengan tenaga kerja yang banyak masih belum menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi.

Pada kasus di Indonesia, tahun 2016-2021 terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai konstanta tinggi dimana ketika LPE mengalami peningkatan juga menyebabkan peningkatan Gini Ratio. Provinsi tersebut ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Apabila dicermati, kelima provinsi tersebut berada di wilayah penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Bappenas mengatakan, bahwa struktur perekonomian Indonesia

masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sulawesi. Akan tetapi, kedua pulau tersebut justru memiliki provinsi dengan angka Gini Ratio yang tinggi. Hal itu disebabkan karena kegiatan ekonomi lebih terkonsentrasi pada sektor industri dan jasa yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja.

Dari tabel 1 diatas, menunjukkan hasil regresi data panel dengan nilai probabilitas variabel akses internet memperoleh hasil sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akses internet berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap angka Gini Ratio. Adapun arah hubungan dari hasil analisis regresi dapat terlihat pada nilai koefisien variabel akses internet yaitu sebesar minus 0.000516. Artinya, ketika variabel akses internet naik 1% maka angka gini ratio akan turun sebesar 0.0516. Ketika persentase rumah tangga yang mengakses internet meningkat maka akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga proses pembangunan suatu wilayah menjadi lebih baik dan mengurangi angka ketimpangan pendapatan.

Statistik Telekomunikasi Indonesia, mengatakan bahwa persentase rumah tangga yang mengakses internet mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi masih ada beberapa provinsi ketika persentase akses internet mengalami peningkatan justru mengalami peningkatan Gini Ratio. Salah satunya ialah Bangka Belitung, meskipun akses internet telah berkembang, namun, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas internet belum merata di seluruh daerah. Masih ada sekitar 41 desa di Bangka Belitung atau 10,49% yang masih mengalami blankspot seluler atau tidak recover sinyal komunikasi, dan juga terdapat desa yang masih menggunakan signal 2G yaitu berjumlah 62 desa atau sekitar 15,86%.

Hasil estimasi model pada nilai probabilitas variabel pembiayaan UMKM memperoleh hasil sebesar 0.0183 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pembiayaan UMKM berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap angka Gini Ratio. Adapun arah hubungan dari hasil analisis regresi dapat terlihat dari nilai koefisien variabel pembiayaan UMKM yaitu sebesar $1.69E-15$. Artinya, ketika variabel pembiayaan UMKM naik sebesar 1 satuan maka angka Gini Ratio akan mengalami kenaikan sebesar $1.69E-12$ (0.00000000000169) angka ini sangat kecil, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan UMKM tersebut memiliki dampak yang sangat kecil.

Kenaikan pembiayaan UMKM dapat berarti bahwa lebih banyak UMKM yang menerima akses pendanaan untuk memperluas usaha mereka. Namun, tidak semua UMKM memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola dana ini dengan efektif. Beberapa UMKM tidak memiliki keahlian manajemen keuangan atau akses ke sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat membatasi pertumbuhan mereka. Akibatnya, UMKM yang lebih besar atau yang memiliki lebih banyak sumber daya akan lebih mampu mengambil manfaat dari pembiayaan tambahan ini, sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Pada kasus di Indonesia, ada beberapa provinsi dengan peningkatan total pembiayaan UMKM tertinggi namun hal tersebut diikuti peningkatan Gini Ratio. Diantaranya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara. Selama periode 2016-2021, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pembiayaan UMKM tertinggi di setiap tahun. Disatu sisi, total pinjaman yang disalurkan oleh perbankan nasional meningkat, ternyata disisi lain juga terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat secara umum. Total dari semua pembiayaan tersebut didominasi oleh UMKM yang telah berkembang. Hal tersebut terjadi karena pemerintah atau lembaga keuangan di wilayah tersebut sering kali memfokuskan pembiayaan UMKM pada sektor-sektor tertentu yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan probabilitas variabel LPE memperoleh hasil sebesar 0.2794 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel LPE tidak berpengaruh pada Gini Ratio.
2. Variabel AI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Gini Ratio dengan koefisien

minus 0,000516. Artinya, ketika variabel AI naik sebesar 1% maka angka Gini Ratio akan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,0516. Hal ini berarti variabel AI mampu menekan angka Gini Ratio dan menciptakan pertumbuhan inklusif di Indonesia. Variabel AI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Gini Ratio dengan koefisien minus 0,000516. Artinya, ketika variabel AI naik sebesar 1% maka angka Gini Ratio akan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,0516. Hal ini berarti variabel AI mampu menekan angka Gini Ratio dan menciptakan pertumbuhan inklusif di Indonesia.

3. Pembiayaan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Gini Ratio dengan koefisien 1,69E-15. Artinya, ketika variabel PUMKM naik sebesar 1 satuan maka angka Gini Ratio akan cenderung mengalami peningkatan sebesar (0,00000000000169). Namun, koefisien yang sangat kecil seperti ini menunjukkan bahwa perubahan 1 satuan dalam pembiayaan UMKM hanya akan menghasilkan perubahan yang sangat kecil dalam peningkatan ketimpangan pendapatan.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih Kepada Kedua Orang Tua, Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Islam Bandung dan seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ibrahim HR. Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. 2018;
- [2] Sukowati JI. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah. 2019;3(November):106–16.
- [3] Iswanto D. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. 2015;4(1):41–66.
- [4] Prasetyo R, Firdaus M. Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia. 2009;222–36.
- [5] MH Arifin. Internet, Ketimpangan Digital Dan Kebijakan Inklusif. 2017;3–15.
- [6] Rahwanto E, Komala R, Kom S. E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia , Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur. 2020;111–24.
- [7] Puspitasari S, Mahri AJW, Utami SA. Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018. 2020;4(1):15–31.
- [8] Frita N, Hamdani I, Devi A, Syariah E, Ibn U, Bogor K. Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Bank Syariah Terhadap Infrastruktur Nasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Program Sdgs Global Financial Inclusion Index 2017 Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019. 2022;5(2):155-182.
- [9] Abie Rachman Muhamad, & Dewi Rahmi. (2023). Pengaruh Teknologi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat 2007-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1924>
- [10] Baihawafi, M., & Sebayang, A. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* , 39–44. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v%vi%i.1911>
- [11] Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>